

Dampak Implementasi Kebijakan Face-Off Jalan Hos Cokroaminoto terhadap Interaksi Ruang Terbuka Publik

Novelian Ahmad Itmamul Wafa

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Article Info

Article history:

Accepted : 24 January 2023

Publish : 02 March 2023

Keywords:

Public policy

Public open spaces

Face-off

Article Info

Article history:

Accepted : 22 Desember 2022

Publish : 02 Maret 2023

Abstrak

This study is to determine the impact of the implementation of the Cokroaminoto HOS Road face-off policy on the interaction of public open spaces. This research chose to use a Qualitative Approach with Descriptive Methods. The research location is HOS Cokroaminoto road, data collection was carried out by conducting interview techniques and also documentation studies. In this study, the data validity testing technique used was the triangulation technique. The results in this study are that the use of public open space is divided into three, namely by the public in general, by the community and the government itself. Utilization by the community is used for economic activities, namely for economic activities by sellers in the public open space environment such as street vendors, as well as other economic sectors. Apart from that social activities, such as recreation, entertainment, gathering with family, socializing, resting, and playing.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan *face-off* Jalan HOS Cokroaminoto terhadap interaksi ruang terbuka publik. Metode pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Ponorogo dengan wilayah kajian Jalan HOS Cokroaminoto. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan teknik Wawancara dan juga Studi Dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Hasil dalam penelitian ini adalah pemanfaatan ruang terbuka publik dibagi menjadi tiga, yaitu oleh masyarakat pada umumnya, oleh komunitas dan pemerintah sendiri. Pemanfaatan oleh masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi, seperti penjual yang ada di lingkungan ruang terbuka publik, yaitu PKL, serta sektor ekonomi yang lain. Selain itu kegiatan yang bersifat sosial, seperti rekreasi, hiburan, berkumpul dengan keluarga, bersosialisasi, beristirahat, dan bermain.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Novelian Ahmad Itmamul Wafa

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: novelian123@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki lintas perbatasan antarprovinsi mempunyai potensi tinggi untuk berkembang. Sejalan dengan perkembangan aktivitas kota, pemerintah semakin gencar melakukan pembangunan untuk menunjang aktivitas kota. Namun, pembangunan kota kerap kali kurang memprioritaskan kebutuhan ruang terbuka bagi masyarakat umum sebagai wadah untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi. Padahal, perkembangan kota yang sangat pesat menimbulkan adanya peningkatan intensitas kegiatan yang membutuhkan ruang untuk mewadahnya, khususnya ruang publik. Karenanya, ketersediaan ruang terbuka publik yang memadai saat ini sangat dibutuhkan oleh daerah yang sedang berkembang, khususnya kawasan perkotaan Kabupaten Ponorogo.

Ruang terbuka publik adalah ruang tidak terbangun dalam kota yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan, estetika, dan kesejahteraan warganya. Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka publik perkotaan adalah dengan melakukan optimalisasi jalan dengan dibangun pedestrian atau *city walk*. Dengan adanya pedestrian, maka kebutuhan ruang bagi pejalan kaki dapat terpenuhi. Selain itu, dapat berperan sebagai ruang berinteraksi sosial dan sebagai ruang beraktivitas ekonomi.

Sebagai salah satu upaya penyediaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ponorogo, Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo masa jabatan 2021-2024 menuangkan dalam program unggulan 99 hari kerja yaitu *Face-Off* Jalan HOS Cokroaminoto (Kominfo, 2021, <https://ponorogo.go.id/2021/04/16/face-off-jalan-hos-cokroaminoto-resmi-dimulai/>) yang bertujuan untuk mempercantik wajah kota sehingga bisa menjadi destinasi wisata kawasan kota yang ke depannya diharapkan dapat memstimulus geliat ekonomi di kawasan tersebut. Kabupaten Ponorogo akan memiliki ikon pedestrian sesuai karakteristik budaya Ponorogo dan diharapkan menjadi kawasan pusat perdagangan/*Central Business District (CBD)*, pusat pendidikan, dan perbankan serta membangkitkan gairah perekonomian pasca Covid-19.

Awal mula lahan tersebut merupakan jalanan yang tiap sisi bahu jalan berdiri ruko-ruko perdagangan. Bertempat di pusat kota Ponorogo, trotoar jalan raya dialihfungsikan menjadi tempat wisata yang ramai pengunjung. Jalan yang semula terdiri dari dua lajur, sekarang diubah menjadi jalan satu arah (*one way*). Jalan raya yang semula lebar, mengalami penyempitan lahan jalan. Trotoar yang selama ini tidak berfungsi, dialihfungsikan sebagai tempat untuk berwisata dengan disediakan tempat duduk yang nyaman. Dalam perkembangannya, alih fungsi lahan di Jalan HOS Cokroaminoto dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya karena adanya kebijakan pemerintah mengenai tata ruang kota, dengan tujuan untuk membuat kota Ponorogo menjadi tertata dan indah.

Sukses dengan *face off* Jalan HOS Cokroaminoto, titik lain yang dibangun adalah pedestrian sisi selatan Jalan Jendral Sudirman. Bagian ini akan diperlebar dari semula berukuran 2,1 meter menjadi sekitar 3 meter. Pemerintah juga akan menambahkan titik-titik biopori dengan kedalaman tertentu di ruas jalan ini. Selanjutnya, dilakukan pembongkaran median jalan yang merupakan bagian dari pembangunan pedestrian atau trotoar di Jalan Urip Sumoharjo. Trotoar tersebut akan diperlebar di bagian utara dan selatan dengan lebar sekitar 2 meter di masing-masing jalur sehingga lebar trotoar di jalan tersebut akan mencapai hampir 5 meter di kanan dan 5 meter di kiri. Fasilitas lampu penerangan bertema reog dan taman serta pepohonan akan menjadi wajah baru pada ruas jalan ini. Setelah pembongkaran median jalan, pemerintah memberlakukan arus lalu lintas satu arah dari barat ke timur untuk ruas Jalan Urip Sumoharjo.

2. LANDASAN TEORI

Upaya mempercantik wajah kota sesuai karakteristik budaya Ponorogo ini merupakan suatu bentuk *City Branding*, yaitu salah satu strategi dari pemasaran suatu kota untuk membuat *positioning* yang kuat, baik dalam skala regional maupun skala global. *City branding* adalah identitas kota yang berguna untuk memasarkan segala aktivitas dari kota tersebut, terutama potensi wisata dan budayanya. Selain itu, *city branding* juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan merk kepada kota agar mudah dikenali dan dapat membentuk *city image* untuk memasarkan daerah baik secara lokal maupun internasional. (Luthfi & Widyaningrat, 2018). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa *city branding* merupakan strategi yang dipakai untuk menjadikan sebuah wilayah agar memiliki suatu identitas tersendiri yang mudah dikenali, yang mana adanya identitas tersebut digunakan untuk memasarkan kota pada konsumen ataupun memasarkan kota pada tingkat lokal ataupun internasional sehingga bisa berdampak pada kegiatan ekonomi suatu kota.

City Branding Kabupaten Ponorogo setelah melalui kajian terkait potensi Kabupaten Ponorogo, maka ditetapkan tagline "*Ethnic Art of Java.*" *City branding* Ponorogo telah menghasilkan trend peningkatan, baik dari segi kualitas pariwisata (kualitas dan mutu seni budaya yang ditampilkan) maupun kuantitas pengunjung. Jumlah kunjungan wisatawan di Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan ke Ponorogo mencapai 249.294 pengunjung. Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan mencapai angka 345.818 pengunjung. (Astuti & Kusumawati, 2018).

Stephen Carr, dkk (1992) melihat ruang terbuka publik sebagai ruang milik bersama, tempat masyarakat melakukan aktivitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan berkala yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang

terbuka, tempat masyarakat melakukan aktivitas pribadi dan kelompok. Pengertian-pengertian mengenai ruang terbuka publik yang dikemukakan oleh para ahli perencanaan kota sangat beragam, beberapa pengertian ruang terbuka publik tersebut, adalah:

1. Ruang terbuka publik adalah lahan tidak terbangun di dalam kota dengan penggunaan tertentu. Pertama, ruang terbuka kota didefinisikan sebagai bagian dari lahan kota yang tidak ditempati oleh bangunan dan hanya dapat dirasakan keberadaannya jika sebagian atau seluruh lahannya dikelilingi pagar. Selanjutnya ruang terbuka didefinisikan sebagai lahan dengan penggunaan spesifik yang fungsi atau kalitas terlihat dari komposisinya (Rapuano, 1994).
2. Ruang terbuka publik merupakan ruang wadah aktivitas sosial yang melayani dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat kota. Ruang terbuka juga merupakan wadah dari kegiatan fungsional maupun aktivitas ritual yang mempertemukan sekelompok masyarakat dalam rutinitas normal kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan periodik (Carr, 1992).
3. Ruang terbuka publik merupakan elemen vital dalam sebuah ruang kota karena keberadaannya di kawasan yang berintensitas kegiatan tinggi. Sebagai lahan tidak terbangun, ruang terbuka biasanya berada di lokasi strategis dan banyak dilalui orang (Nazarudin, 1994).

A. Tujuan Ruang Terbuka Publik

Secara umum, tujuan ruang terbuka publik (Carr dkk, 1992) adalah:

1. Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat menjadi motivasi dasar dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik yang menyediakan jalur untuk pergerakan, pusat komunikasi, dan tempat untuk merasa bebas dan santai.
2. Peningkatan Visual (*Visual Enhancement*)
Keberadaan ruang publik di suatu kota akan meningkatkan kualitas visual kota tersebut menjadi lebih manusiawi, harmonis, dan indah.
3. Peningkatan Lingkungan (*Environmental Enhancement*)
Penghijauan pada suatu ruang terbuka publik sebagai sebuah nilai estetika juga paru-paru kota yang memberikan udara segar di tengah-tengah polusi.
4. Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*)
Pengembangan ekonomi adalah tujuan yang umum dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik.
5. Peningkatan Kesan (*Image Enhancement*)
Merupakan tujuan yang tidak tertulis secara jelas dalam kerangka penciptaan suatu ruang terbuka public namun selalu ingin dicapai.

B. Fungsi Ruang Terbuka Publik

Ruang terbuka publik sebagai salah satu elemen perancangan kota mempunyai fungsi-fungsi:

1. Ruang terbuka publik melayani kebutuhan sosial masyarakat kota dan memberikan pengetahuan kepada pengunjungnya. Pemanfaatan ruang terbuka publik oleh masyarakat sebagai tempat untuk bersantai, bermain, berjalan-jalan dan membaca (Nazarudin, 1994).
2. Ruang terbuka publik adalah simpul dan sarana komunikasi pengikat social untuk menciptakan interaksi antarkelompok masyarakat (Carr, 1992).

C. Jenis Ruang Terbuka Publik

Ruang terbuka publik dapat berupa *landscape* (ruang terbuka hijau) maupun *hardscape* (ruang terbuka terbangun), pengkategorianya adalah:

1. Ruang terbuka publik skala lingkungan dengan luas dan lingkup pelayanan kecil, seperti ruang sekitar tempat tinggal (*home oriented space*), ruang terbuka lingkungan (*neighbourhood space*) (Rapuano, 1964).
2. Ruang terbuka publik skala bagian kota yang melayani beberapa unit lingkungan, seperti taman umum (*public park*), ruang terbuka untuk masyarakat luas (*community space*).
3. Ruang terbuka publik dengan fungsi tertentu, seperti ruang sirkulasi kendaraan (jalan raya/freeway, jalan arteri, dll), ruang terbuka publik di pusat komersial (area parkir, *plaza*,

dan *mall*), ruang terbuka publik kawasan industri, dan ruang terbuka publik peringatan (*memorial*) (Carr, 1992).

4. Pasar terbuka publik (*markets*), yaitu ruang terbuka publik atau jalan yang digunakan untuk PKL, bersifat temporer pada ruang yang ada seperti taman, daerah pinggir jalan, atau area parkir (Carr, 1992)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif, lokasi penelitian adalah Kabupaten Ponorogo dengan wilayah kajian Jalan HOS Cokroaminoto, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan teknik Wawancara dan juga Studi Dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Teknik triangulasi berdasarkan menurut Moleong (2011) adalah teknik pada pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang ada. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber adalah teknik yang membandingkan derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu, orang dan alat yang berbeda (Patton dalam Moleong (2011)). Sementara itu teknik analisis data Menurut Sugiyono (2015) aktivitas dalam menganalisis data dapat meliputi sebagai berikut reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan/Verifikasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Urip Sumoharjo merupakan sebuah nama jalan pada umumnya yang menjadi penghubung antara satu tempat ke tempat lain. Terletak di pusat perdagangan kota, wilayah ini tidak pernah sepi oleh aktivitas manusia. Pohon-pohon yang terdapat di sisi kanan dan kiri jalan dapat membuat suasana kota menjadi rindang. Sebelum dilakukan pembangunan (*Face off*) pedestrian, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Urip Sumoharjo terdiri dari dua arah serta memiliki lebar jalan yang luas. Karena menjadi pusat perdagangan berupa toko-toko, menyebabkan sisi ruas jalan jalan ditemukan pedagang kaki lima. Walaupun jarang ditemukan peganga kaki lima, aktivitas yang terjadi sepanjang jalan tersebut terbilang ramai sepanjang jalan terdiri dari pertokoan yang ramai pengunjung. Namun kegiatan yang berlangsung pada sepanjang jalan tersebut hanya kegiatan ekonomi berupa transaksi jual beli dan tidak terdapat aktivitas lain, misalnya seperti menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat.

Sistem lalu lintas juga berjalan normal selayaknya jalan pada umumnya. Terlihat juga bahwa pemerintah cenderung memelihara lingkungan dengan adanya pohon-pohon di sepanjang jalan. Baik trotoar serta jalanan tidak terdapat kerusakan ataupun hal lain yang bersifat negatif. Namun, pemerintah melakukan perubahan perwajahan (*face off*) pada pedestrian Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Urip Sumoharjo dengan sistem alih fungsi lahan yang semula jalanan dengan pertokoan biasa, menjadi kawasan wisata yang ramai pengunjung. Terdapat perubahan total yang terjadi pada sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Jendral Sudirman, dan Jalan Urip Sumoharjo. Sejumlah titik pada wilayah tersebut ditata dengan model pembangunan berupa kawasan wisata.

1) Impelementasi Kebijakan

Adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka setiap Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032. Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaat ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pemanfaatan tata ruang dan ruang terbuka di Ponorogo sebagian besar sudah sesuai,

tetapi di beberapa kawasan masih terlihat pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak sesuai aturan. Kawasan ruang terbuka hijau taman kota terdiri dari Alun-alun kota, Taman Sukowati, Taman Pendopo Kabupaten, dan Tugu Air Mancur. Pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan alun-alun sebagai ruang publik tentunya tidak bisa terlepas dari aktivitas dan kegiatan masyarakat, khususnya untuk kepentingan rekreasi. Alun-alun Kota Ponorogo terdiri dari berbagai zona yang penempatannya didasarkan pada berbagai tujuan. Pembagian 3 zona tersebut terdiri dari zona berdagang, zona olahraga, dan zona rekreasi. Beberapa pedagang kaki lima juga terdapat di Jalan Alun-alun utara yang penataan lapaknya kurang teratur sehingga berpengaruh terhadap estetika dari kawasan alun-alun. Pemanfaatan untuk kawasan ruang terbuka publik taman kota lainnya sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Pemerintah ingin merubah penampakan Jalan HOS Cokroaminoto menjadi serupa dan serapi dengan Jalan Malioboro Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk membentuk tatanan kota agar lebih indah serta untuk menarik minat wisatawan dari lokal maupun inter-lokal Ponorogo sendiri. Dengan adanya upaya tersebut, pemerintah berharap dengan adanya kawasan wisata ini dapat memunculkan sumbu ekonomi serta budaya di Ponorogo. Trotoar yang ada sebelumnya, mengalami pelebaran untuk selanjutnya dilakukan pembangunan kawasan wisata pada trotoar tersebut. Pembangunan ini dimulai pada saat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko baru saja dilantik sebagai bupati dan masih dalam situasi pandemi. Harapan dengan adanya pembangunan ini, sistem tata ruang kota menjadi lebih tertata rapi dari sebelumnya yang hampir tidak difungsikan dan sekarang telah menjadi kawasan wisata. Selain itu, dengan adanya pembangunan ini dapat digunakan untuk meningkatkan sumbu ekonomi, budaya dan pariwisata (Astina & Abubakar Hamzah, 2013).

Langkah kebijakan pemerintah merupakan sebuah pengelolaan sistem pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan. Kaitannya dengan perubahan perwajahan Jalan HOS Cokroaminoto, Bupati Ponorogo berperan dalam menentukan perubahan alih fungsi lahan ini menjadi kawasan wisata. Menurut laman dari Kominfo Jatim, dengan adanya perubahan ini diharapkan akan memberikan suasana baru bagi kota Ponorogo. Mulai dari tata ruang kota yang rapi, menciptakan sumbu ekonomi, budaya, serta pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat (Kominfo Jatim, 2021).

Dikutip dari laman ponorogo.go.id, *face-off* Jalan HOS Cokroaminoto ini dilakukan dengan pesan mendalam. Di antaranya agar seluruh masyarakat Ponorogo bisa menghargai pahlawan yang jadi nama jalan tersebut. HOS Cokroaminoto adalah seorang tokoh pejuang yang terlahir di Ponorogo dan melahirkan banyak tokoh nasional. *Face-off* jalan ini diawali dari depan Masjid Darul Hikmah atau lebih merakyat dikenal dengan Masjid Dhuwur. Kemudian bergeser ke titik ke dua, yakni di depan gedung BRI Cabang Ponorogo dan selanjutnya bergeser ke depan mini market modern di sekitar pertigaan Ngepos. Pembangunan *face-off* dengan program gotong royong dari berbagai pihak ini segera cepat selesai. Dengan *face-off*-nya jalan HOS Cokroaminoto ini, sumbu ekonomi di Ponorogo ini akan hidup. Sebab, di masa pandemi Covid-19 ini, harus ada inisiatif. Tidak hanya untuk bertahan tetapi juga bangkit, sehingga ekonomi bias turut bangkit. Selain itu, pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya memperbaiki tata kotanya sehingga bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah meyakini bahwa *face-off* jalan HOS Cokroaminoto akan mengawali sumbu ekonomi. Dalam pembangunan *face-off*, pemerintah bersama stakeholder yang terlibat menggelontorkan tak kurang dari Rp 270 juta. Dana tersebut berasal dari beberapa organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan NU untuk pelebaran trotoar, penyediaan kursi taman dan pemasangan lampu hias. Selain kedua organisasi tersebut, sejumlah pihak yang bergotong royong menyumbangkan dana dan tenaga dalam penataan perwajahan Jalan HOS Cokroaminoto antara lain adalah Ponpes Gontor, BNI, BRI, Bank Jatim, BTN, dan sejumlah lembaga lain.

2) Dampak Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik *face off* Jalan Hos Cokroaminoto

Ruang publik merupakan bagian penting dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

Penataan kota yang memberikan ruang pada publik untuk menjalankan fungsinya sebagai bagian dari menjalankan fungsi dari kota itu sendiri. Ruang terbuka publik menjadi lebih populer sejak semakin gencarnya -isu wilayah perkotaan, tentang kemacetan, kriminalisasi, gaya hidup, polusi, lingkungan, pembangunan manusia, kebahagiaan, dan sebagainya. Menjadi lebih penting untuk diperhatikan bahwa pemanfaatan ruang terbuka public ini mempunyai tujuan yang nantinya dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di perkotaan khususnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan kita dari DPUKPP di bawah ini:

“di ruang publik itu kan masyarakat bisa melakukan apa saja, tujuan ruang publik adalah seperti itu, masyarakat bias menggunakannya untuk keperluannya, bisa refreshing disitu, bisa melakukukan kegiatan-kegiatan lain yang positif”

Sejalan seperti yang untkapkan Carr, dkk (1992), tujuan ruang terbuka publik di bawah ini:

- 1) Kesejahteraan Masyarakat: Kesejahteraan masyarakat menjadi motivasi dasar dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik yang menyediakan jalur untuk pergerakan, pusat komunikasi, dan tempat untuk merasa bebas dan santai.
- 2) Peningkatan Visual (*Visual Enhancement*): Keberadaan ruang publik di suatu kota akan meningkatkan kualitas visual kota tersebut menjadi lebih manusiawi, harmonis, dan indah.
- 3) Peningkatan Lingkungan (*Environmental Enhancement*): Penghijauan pada suatu ruang terbuka publik sebagai sebuah nilai estetika juga paru-paru kota yang memberikan udara segar di tengah-tengah polusi.
- 4) Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*): Pengembangan ekonomi adalah tujuan yang umum dalam penciptaan dan pengembangan ruang terbuka publik.
- 5) Peningkatan Kesan (*Image Enhancement*): Merupakan tujuan yang tidak tertulis secara jelas dalam kerangka penciptaan suatu ruang terbuka publik namun selalu ingin dicapai.

“sekarang banyak yang jualan mbak, karena semakin banyak pengunjung di HOS Cokroaminoto ini yang kebanyakan membawa anak-anak mereka untuk bermain, jadi banyak yang jual jajanan-jajanan. Lumayan mbak itu yang jualan untuk menambah penghasilan. Ada tukang parkir juga yang menghasilkan”

Bahwa ruang terbuka publik di Jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo menjadi sorotan tersendiri dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, karena pemerintah mulai berbenah dan terus mengupayakan untuk pembangunan-pembangunan fisik ruang terbuka publik. Salah satunya pembangunan pedestrian HOS Cokroaminoto sendiri yang menjadi hasil yang bagus. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut, di antaranya adalah dampak ekonomi, dan sosial.

Munculnya sektor ekonomi informal ini menjadi salah satu tanda bahwa ruang publik ini berfungsi sesuai tujuannya, yaitu untuk pengembangan ekonomi sesuai penjelasan dari Carr, dkk (1992). Selain itu juga ada tanda yang lain seperti telah mulai ramainya ruang terbuka publik ini oleh aktivitas masyarakat, baik untuk aktivitas individu missal rekreasi, refreshing, atau hanya sekedar istirahat, atau aktivitas kelompok, baik kecil maupun komunitas yang besar, misal banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas anak muda yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Konsep teritorialitas pada ruang terbuka publik khususnya oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi bagian permasalahan setiap kota di Indonesia sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi, dkk (2012). Teritorial PKL tersebut muncul disebabkan adanya motif dan kebutuhan dari PKL itu sendiri untuk berjualan di lokasi yang dianggap strategis di ruang publik seperti jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo dengan Pemilik Toko memiliki teritori formal sehingga tidak bisa diganggu oleh individu lain karena dimiliki secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun begitupun pemilik toko

melakukan dua macam usaha membentuk ruang teritori. Pertama, pemilik toko melakukan penandaan dengan meletakkan barang dagangan untuk membentuk teritori yang terbentuk akibat motif dan kebutuhan pemilik toko agar *display* barang dagangan dapat dengan mudah dilihat oleh pembeli dan menambah luas area *display*. Dengan terbentuknya batasan-batasan fisik di *sidewalk* toko membentuk teritorialitas yang non-formal dari pemilik toko di area yang sesungguhnya adalah domain publik. Kedua, pemilik toko mempertegas batasan teritori anyar pemilik toko lainnya. Dengan demikian, ada unsur laten di luar manifes area itu sebagai jalur pejalan kaki sebagai suatu ‘teritori non-formal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam kebijakan ruang terbuka publik dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang ingin merubah tata ruang kota menjadi indah dan rapi, yang semula hanya berupa trotoar, diubah menjadi kawasan wisata kota yang ramai pengunjung. Meskipun dibangun atas kebijakan pemerintah, para responden merasa senang dengan adanya pembangunan tersebut. Responden memanfaatkan lahan yang tersedia untuk membuka usaha baru serta dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, beberapa pedagang yang sebelumnya telah membuka usaha di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan pendapatan.

Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik dibagi menjadi tiga, yaitu oleh masyarakat pada umumnya, oleh komunitas dan pemerintah sendiri. Pemanfaatan oleh masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi, seperti kegiatan jual beli oleh PKL dan masyarakat di lingkungan ruang terbuka publik serta sektor ekonomi yang lain. Selain itu kegiatan yang bersifat sosial, seperti rekreasi, hiburan, berkumpul dengan keluarga, bersosialisasi, beristirahat dan bermain. *Face off* jalan Hos Cokroaminoto dilakukan dengan semua stakeholders organisasi, toko, bank, dan masyarakat sendiri untuk menjadikan pedestrian di Kawasan HOS Cokroaminoto dengan gotong royong semua pihak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Astina, C., & Abubakar Hamzah, M. N. (2013). Pengaruh Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 1(3).
- Astuti, W. P., & Kusumawati, A. (2018). Upaya Pemasaran Pariwisata Ponorogo Melalui City Branding dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus pada City Branding Kabupaten Ponorogo dengan Tagline “Ethnic Art of Java”). *Jurnal Administrasi Binis*, 55(1), 48-58.
- Carr, Stephen, Mark Francis, Leane G. Rivlin and Andrew M. Store. 1992. *Public Space*. Australia: Press Syndicate of University of Cambridge.
- Kominfo. 2021. *Face Off Jalan HOS Cokroaminoto Resmi Dimulai*. Ponorogo: <https://ponorogo.go.id/2021/04/16/face-off-jalan-hos-cokroaminoto-resmi-dimulai/>. Diakses tanggal 1 Desember 2022.
- Kurniadi, F., Pramitasari, D., & Wijono, D. (2012). Konsep Perilaku Teritorialitas di Kawasan Pasar Sudirman Pontianak. *Vokasi*, 8(3), 197–208. Retrieved from http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/08-Fery_ganti6.pdf
- Luthfi, A., & Widyaningrat, A. I. 2018. *Konsep City Branding Sebuah Pendekatan “The City Brand Hexagon” pada Pembentukan Identitas Kota.* UNEJ E-Proceeding.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep Dasar Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Remaja Rosdakarya (Edisi Revisi).
- Nazaruddin, 1994. *Penghijauan Kota*. Jakarta: Penerbit Swadaya.
- Rapuno, Michael, DR. P. P. Pirone and Brooks E. Wigginton. 1964. *Open Space in Urban Design*. Ohio : The Cleveland Development Foundation
- Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*, 28, 1–12.